

MENDADAK KONSESI TAMBANG UNTUK PERGURUAN TINGGI



Pijakan Revisi

Revisi UU Minerba kali ini juga berpijak pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Beleid tersebut menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara. Negara memiliki dan mengendalikan semua aset alam ini, untuk digunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat.

APA YANG REVISI?

- UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba)

Fokus 4 Hal:

- Pertama, terkait percepatan hilirisasi mineral dan batu bara. Dia mengatakan, hilirisasi harus didorong agar Indonesia bisa lebih cepat mewujudkan swasembada energi.
- Kedua, terkait aturan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
- Ketiga, terkait pemberian IUP kepada perguruan tinggi. Menambahkan pasal dalam UU Minerba:
 - Pasal 51A ayat (1) yang menyatakan WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.
 - Pasal 51A ayat (2) mengatur soal pertimbangan pemberian WIUP ke perguruan tinggi, salah satunya persyaratan akreditasi perguruan tinggi yang boleh mengelola lahan tambang, yakni paling rendah terakreditasi B.
 - Pasal 51A ayat (3) menyampaikan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP kepada perguruan tinggi yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah (PP).
- Keempat, terkait pemberian IUP untuk usaha kecil menengah (UKM) dan usaha kecil.

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI mendadak membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) pada Senin (20/1/2025). Rapat maraton ini digelar saat para wakil rakyat masih berada di masa reses, yang tinggal sehari lagi. Dihadiri 23 anggota Panja RUU Minerba yang mewakili 8 fraksi partai di DPR, diskusi digelar tertutup. Kejutannya, DPR RI bakal memberikan jatah pengelolaan tambang untuk perguruan tinggi negeri. Diketahui sebelumnya skema konsesi yang sama diberikan ke Organisasi Kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Pro-kontra pun mencuat. Meskipun dalam Tridharma terdapat nilai pengabdian kepada masyarakat, kampus mengelola tambang dengan tujuan komersial alias cari laba semata dinilai tidak tepat. Pemerintah harusnya fokus pada RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang masih jalan di tempat

Baca Hal 11....

Gaduh Demo Kemendiktisaintek, Pegawai-Menteri Saling Tuding

Dituduh Arogan dan Menampar, Satriyo Sebut Ulah Pegawai Tak Mau Dimutasi

JAKARTA-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menuai sorotan pada Senin (20/1/2024). Sang Menteri, Satriyo Soemantri Brodjonegoro didemo oleh para pegawai.

Para pegawai ASN menggelar demo di Gedung Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, sejak pukul 08.00 WIB. Pegawai kompak menggunakan pakaian serba hitam dan mengirim karangan bunga dengan kata-kata satir yang ditunjukkan kepada Satriyo.

Beberapa tulisan dalam karangan bunga itu yakni 'Kami Tidak Diam Saat Hak Diinjak', 'Luka Satu Adalah Luka Kita Semua, Ketidakadilan Pada Satu, Adalah Ancaman Bagi Kita Semua', 'Semoga Bahagia di Atas Derita Pegawai Sendiri'.

Di bawah karangan bunga itu bertuliskan #Lawan! #MenteriDzalim #PaguyubanPegawaiDikti.

Para pegawai ASN ini nekat demo imbas mutasi yang menimpa Prahum Ahli Muda dan Pj Rumah Tangga Kemendiktisaintek, Neni Herlina, ke Kemendikdasmen. Neni bilang, dirinya dipindah tidak sesuai prosedur. Tidak hanya itu, mencuat isu Satriyo disebut kerap bersikap kasar.

"Ya saya disuruh ke Kemendikdasmen pokoknya gitu, 'Keluar ke Kemendikdasmen gitu, bawa barang-barang kamu' kayak gitu," kata Neni.

Neni menuturkan, pemindahan dirinya bermula dari penataan letak meja yang tidak sesuai dengan permintaan Satriyo. Dilanjutkan, dengan insiden pemasangan Wi-Fi di rumah dinas di Widya Chandra yang terlampau malam.

"Ketika pertama kali masalah meja itu. Meja itu salah ada di ruang beliau sebenarnya kan minta ganti aja. (Kemudian) ada kejadian lagi, jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet. Sementara kita kan minta segera, karena Pak Menteri maunya segera, kita minta mereka untuk meneyegerakan," ucap dia.

Neni Herlina mengungkap kalau sikap arogansi bukan cuma ditunjukkan Menteri Dikti Sainstek, Satriyo Soemantri Brodjonegoro saja, melainkan juga istrinya.

"Kalau mau saya bilang, attitude ibu menteri ini juga disayangkan ya. Sekelas ibu menteri kalau bicara itu kasar," kata Neni.

la pun tak menampik kalau sikap arogansi Satriyo juga imbas dari kelakuan istrinya. Neni terang-terangan mengungkap kalau istrinya kerap juga memberi ancaman pemecatan kepada pegawai kalau tidak mau menuruti perintah.

"Menurut saya sih dominasi ibu tuh sangat-sangat besar ke bapak," kata Neni.



Suasana saat pegawai ASN menggelar demo di Gedung Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025) sejak pukul 08.00 WIB.

Selain itu, sang istri juga kerap menuduh pegawai dapat uang dari para pejabat Kementerian. "ini bu Neni dikasih uang sama Dirjen ya," kata Neni mencontohkan pernyataan istri Menteri Satriyo. "Jadi suudzon, fitnah," sambung Neni.

Sekjen Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang mengatakan, ada tiga hal yang memicu sejumlah ASN melakukan demo. Salah satunya terkait mutasi.

Pertama, reorganisasi kementerian yang berdampak pada perbedaan cara kepemimpinan sebelumnya dan sekarang. Era Presiden Jokowi, Kemendiktisaintek merupakan satu kesatuan dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Iya, jadi yang pertama kan selalu ini kan proses, jadi ada tiga apa ya, pemicu pula mungkin, kalau mungkin konteks ya. Jadi konteks pertama ini kan kita pemekaran. Nah dalam pemekaran ini kan pasti ada reorganisasi, ada penyesuaian, ada langkah-langkah yang diambil pimpinan yang mungkin berbeda dengan pimpinan sebelumnya," kata Togar.

Kedua, menurut Togar, ada perbedaan cara berkomunikasi ini pimpinan Kemendiktisaintek dengan pegawai.

Sedangkan ketiga, Togar mengatakan ada pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang dilakukan ASN seperti pemenuhan kebutuhan di meja kerja Satriyo.

"Nah itu kan harus di-recover dengan cepat. Jadi ada memang rentetan yang terjadi, seperti tadi itu ada perbedaan meja, jadi diharapkan kan mejanya itu ya meja yang pantas lah sebetulnya, bukan mewah, jangan mewah tapi yang pantas, nah ini dianggap kurang pantas gitu," ucap Togar.

Togar membantah isu pemecatan yang dilakukan Satriyo kepada sejumlah ASN. Yang ada, kata Togar, penonaktifan sementara waktu kepada ASN tersebut.

"Dan tidak ada pemecatan. Dan itu hoaks ya, pemecatan itu hoaks. Ya mungkin itu nanti bisa ditulis, pemecatan itu hoaks hanya suatu

bahasa euphoria lah kita sebut ya. Jadi yang ada itu sebenarnya penonaktifan," kata Togar.

"Jadi jangan lagi membantu atau mengurus pekerjaan itu. Cukup orang lain aja yang lebih mampu, yang lebih bagus, yang memenuhi ekspektasi. Nah itu kira-kira kali ya," tutur dia.

Satriyo: Bersih-bersih

Satriyo Soemantri Brodjonegoro buka suara terkait aksi demo yang dilakukan pegawai ASN-nya. Satriyo mengatakan, aksi demo dipicu karena pihaknya melakukan mutasi besar di Kemendiktisaintek. Mutasi itu imbas pemisahan kementerian.

Era Presiden Jokowi, Kemendiktisaintek, Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masuk dalam satu naungan Kemendikbudristek dan Dikti. Namun era Prabowo, dipecah menjadi tiga kementerian.

"Demo itu terkait dengan kami yang sedang mengadakan mutasi besar-besaran di kementerian. Karena jadi 3 menteri, kita perlu banyak orang kemudian kita ingin membenahi," kata Satriyo kepada wartawan usai menghadiri pelantikan Rektor ITB di Sabuga, Bandung.

Satriyo menyinggung pernyataan Prabowo agar kementerian harus hemat anggaran. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan mutasi besar namun ada pegawai yang tidak terima dengan mutasi dan melakukan aksi demo.

"Presiden mengatakan harus hemat dengan anggaran pemerintah. Nah kita mengadakan 1 mutasi yang cukup besar. Dan karena memang ada pihak yang tidak berkenan dimutasi maka (terjadi demo)," kata Satriyo.

Ternyata, 2 minggu sebelum demo pegawai ASN, Satriyo Soemantri Brodjonegoro melantik tujuh pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendiktisaintek, Senin (6/1/2025).

Satriyo mengatakan, pelantikan 7 pejabat baru ini bukan sekadar formalitas. Namun, ada amanah dan tanggung jawab

PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENDIKTISAINTEK YANG DILANTIK SATRYO:

-  Togar Mangihut Simatupang sebagai Sekretaris Jenderal.
-  Khairul Munadi sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
-  Fauzan Adziman sebagai Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan.
-  Ahmad Najib Burhani sebagai Direktur Jenderal Sains dan Teknologi.
-  Chatarina Muliana sebagai Inspektur Jenderal.
-  M. Hasan Chabibie sebagai Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
-  Nur Syarifah sebagai Staf Ahli Bidang Regulasi.

besar dalam menjalankan peran Kemendiktisaintek dalam mendukung visi dan misi pemerintah Prabowo-Gibran yang tertuang dalam Asta Cita, delapan program terbaik cepat, dan tujuh belas program prioritas.

Sementata, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memerintahkan Komisi X yang menjadi mitra kerja Kemendiktisaintek untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kejadian ini.

"Tentunya kita akan mencari kita akan kaji nanti kita akan minta Komisi teknis terkait kementerian juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/1/2025).

Saat dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta masalah yang terjadi untuk diselesaikan secara internal. (din, ant, rls, kum/dya)



Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Indonesia, Satriyo Soemantri Brodjonegoro

Puan Minta Komisi IX DPR Tindaklanjuti Polemik Regulasi Tembakau

JAKARTA -Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Bagian XXI tentang Pengamanan Zat Adiktif yang termuat dalam Pasal 429-463, dan aturan turunannya (Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan) mendapat sorotan dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

Beredar surat resmi dari Puan perihal tindaklanjuti ke Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan. "Sehubungan dengan hal itu, kami sampaikan bahwa sesuai arahan Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, surat tersebut (GAPPRI) akan ditindaklanjuti oleh Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," bunyi kutipan surat yang dikeluarkan Sekjen DPR dikutip Senin (20/1/2025).

Surat bernomor: B/0634PT.06/09/2024, tertanggal 25 September 2024, merupakan balasan surat yang dikirimkan oleh Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI).

"Dengan hormat kami sampaikan bahwa surat Saudara nomor: D.0837/P.GAPPRI/IX/2024 tanggal 03 September 2024 Perihal: Penolakan terbitnya PP 28/2024 tentang Kesehatan sudah kami terima dengan baik. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih," demikian bunyi surat tersebut.

Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Sarmidi Husna berpandangan, sikap Puan ini merupakan perhatian terkait polemik PP 28/2024 dan aturan turunan yang akan berdampak ganda (multiplier effect) bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau nasional.

"Harapan kami, Pimpinan Komisi IX DPR RI menindaklanjuti arahan Ketua DPR RI untuk mereview polemik PP 28/2024 dengan melibatkan lintas stakeholders sehingga ada jalan tengah," kata Sarmidi.

Hasil kajian P3M menyatakan bahwa produk hukum PP 28/2024 terdapat banyak pasal yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi.

"PP 28/2024 sebagai produk hukum yang dalam proses penyusunannya tidak partisipatif karena tidak melibatkan para pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak pemberlakuan peraturan tersebut yang berpotensi mematikan ekosistem pertembakauan yang sudah berkontribusi terhadap perekonomian rakyat dan negara Indonesia," tegasnya.

Sementara, Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji mengaku pernah mengirimkan surat terbuka yang ditujukan untuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Surat tertanggal 02 September 2024, dengan nomor



(Ilustrasi) Petani tembakau khawatir dengan Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024 karena peraturan ini dianggap menyulitkan. (Dok)

026/DPN APTI/IX/2024, perihal penolakan PP No 28 Tahun 2024 dan produk turunannya.

Menurutnya, terbitnya PP 28/2024 dan menyusul produk turunan merupakan bentuk nyata kriminalisasi terhadap hak ekonomi petani tembakau. "Kami sebagai bagian dari keanekaragaman Warga Negara Indonesia yang berkecimpung di sektor pertanian tembakau merasa dikriminalisasi hak ekonominya.

Selama 5 tahun terakhir produk hukum yang dibuat mulai dari Undang Undang sampai Peraturan Daerah terus menerus menghimpit eksistensi pertembakauan yang dampaknya sangat terasa pada lemahnya perekonomian pertembakauan," kata Agus.

Saat ini, jutaan petani tembakau harus dihadapkan pada terbitnya PP 28/2024 yang disinyalir sebagai alat pemusnah pertanian tembakau di Indonesia.

Agus mengungkapkan, sejak terbitnya PP 28/2024, saat musim panen yang seharusnya industri saling berkompetisi menyerap bahan baku hasil panen, sampai saat ini sudah separuh musim panen, industri sudah banyak yang mundur karena tidak melakukan pembelian atau penyerapan.

"Bagi kami para petani tembakau mengalami kebingungan karena serapan tembakau jauh dari harapan. Ini sinyal efek domino negatif pada ambruknya ekonomi di sentra pertembakauan," tegas Agus Parmuji.

Agus bilang kalau Kemenkes terlalu bernafsu untuk mengimplementasikan PP 28/2024 dan RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik, adalah arogansi kebijakan yang tujuannya untuk mengkriminalisasi atau mematikan petani tembakau.

Pasalnya, produk hukum itu merupakan agenda besar global/asing dengan melibatkan kelompok anti tembakau yang sengaja akan membunuh hak ekonomi petani tembakau. (sin, ant, rls/dya)

Cukai Rokok Diusulkan Dana Makan Bergizi Gratis

PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto masih disorot setelah berlangsung sekitar dua pekan. Sorotan itu semakin riuh usai sejumlah pihak mengusulkan sumber dana alternatif yang dapat membantu mencukupi biaya program tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Irma Suryani mengusulkan pembiayaan implementasi MBG didanai cukai rokok. Usulan ini tak lepas dari pendapatan negara dari cukai rokok menyentuh ratusan triliun.

Ia juga mengaku tidak sepatutnya dengan usulan MBG didanai menggunakan dana zakat. Sebab, dana zakat itu sudah diatur secara jelas peruntukannya.

"Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," kata Irma dalam keterangannya seperti dikutip Senin (20/1/2025).

Sebelumnya muncul usulan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program MBG melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS); dana sitaan dari koruptor; dan usulan pemerintah memanfaatkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Terpisah, Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta Achmad Nur Hidayat memandang usulan Anggota Komisi

IX DPR untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis akan memunculkan sejumlah masalah mendasar.

Achmad Nur Hidayat di Jakarta, mengatakan bahwa menggunakan dana cukai rokok untuk mendanai program gizi bagi anak-anak menghadirkan kontradiksi moral yang sulit diabaikan.

Pasalnya rokok, yang menjadi sumber dana dalam skema ini, merupakan salah satu penyebab utama berbagai masalah kesehatan di Indonesia, termasuk penyakit paru-paru, jantung dan kanker.

"Mengandalkan dana cukai rokok, pemerintah secara tidak langsung mendukung konsumsi rokok untuk membiayai program yang bertujuan meningkatkan kesehatan generasi muda. Hal ini dapat dianggap sebagai langkah yang inkonsisten dengan upaya pemerintah untuk menekan angka perokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja," ujar Achmad

Menanggapi hal itu, Achmad menjelaskan bahwa dengan pendapatan cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun, solusi ini memang tampak sederhana dan praktis untuk menutupi kekurangan anggaran program MBG yang diproyeksikan membutuhkan dana hingga Rp420 triliun. Namun, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan ulang usulan

tersebut.

Achmad juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada cukai rokok sebagai sumber pendanaan menghadirkan risiko besar bagi keberlanjutan program MBG.

Pendapatan cukai rokok tidak stabil dan cenderung menurun seiring keberhasilan kebijakan pengendalian tembakau. Apabila pemerintah terlalu bergantung pada dana ini, keberlangsungan program MBG di masa depan bakal bisa terancam.

"Sebagai program yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi nasional, MBG membutuhkan sumber pendanaan yang stabil dan dapat diproyeksikan dengan akurat. Ketergantungan pada cukai rokok akan menciptakan ketidakpastian finansial yang berisiko menghambat pelaksanaan program, terutama di masa depan ketika beban gizi buruk dan stunting masih menjadi masalah besar di Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Achmad juga mengkritisi usulan tersebut sebagai langkah reaktif yang hanya menutupi masalah struktural dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurutnya, daripada mengandalkan cukai rokok, pemerintah perlu fokus pada solusi yang lebih berkelanjutan, seperti optimalisasi belanja negara dan reformasi perpajakan. (din, ant/dya)

Polemik Pagar Laut

KKP Sebut Dibongkar Rabu, Menteri ATR BPN Akui Ada 263 Sertifikat

JAKARTA-Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, akan dibongkar pada Rabu (22/1/2025) secara bersama-sama setelah rapat koordinasi bersama jajaran TNI AL dan pihak terkait lainnya

Usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/1/2025), Trenggono melaporkan bahwa pihaknya akan melakukan rapat koordinasi bersama jajaran TNI AL pada Rabu (22/1/2025) pagi, kemudian pada siang di hari yang sama, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan TNI AL melanjutkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan tersebut.

"Sesuai koridor hukum dan kemudian saya sampaikan di sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak dan pada saat itu kita bongkar," kata Trenggono saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta.

Trenggono menjelaskan bahwa rapat koordinasi akan dilakukan di dekat kawasan perairan bersama TNI AL, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Menteri KKP menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut dapat diselesaikan pada pekan ini, sehingga nelayan bisa melakukan kembali aktivitas sehari-hari, setelah jalur melaut dibuka.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa koordinasi bersama Menteri Trenggono, Wakil Menteri Didit beserta jajarannya, merupakan upaya evaluasi pembongkaran pagar laut di perairan tersebut.

"Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat, membantu kesulitan masyarakat nelayan," kata Ali dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

Ali menuturkan bahwa upaya tersebut sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu nelayan yang terdampak dari hadirnya pagar laut tersebut.

Pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang telah dilakukan oleh sedikitnya 600 personel dari



Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). (Dok)

jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) beserta nelayan pada Sabtu (18/1/2025) pagi.

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto di Tangerang, mengatakan proses pembongkaran pagar laut yang terbuat dari bambu itu akan dilakukan secara bertahap.

Akui Sertifikat Berseliweran

Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Mahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi BHUMI ATR/BPN dan hasilnya diunggah di media sosial.

"Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos," ujar Nusron dalam keterangan pers, dikutip Senin (20/1/2025).

Nusron mengungkapkan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang.

Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. "Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi BHUMI, yaitu di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji,

Kabupaten Tangerang," tandasnya.

Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Senin (20/1/2025).

Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah-sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohod tersebut berada di dalam garis pantai (daratan) atau berada di luar garis pantai (laut).

Pasalnya, di dalam pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga, pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024, hingga sekarang.

"Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok (Selasa) sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana," tuturnya.

Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR/BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai (laut), bukan di dalam garis pantai (daratan).

"Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang," jelasnya.

Menurut Nusron, Kementerian ATR/BPN masih memiliki

5 FAKTA PAGAR LAUT 30 KM DI TANGERANG

Disegel KKP

KKP mendatangi dan menyegel kawasan pagar laut tersebut pada Kamis (9/1/2025).

Arahan Prabowo

Penyegelan pagar laut tersebut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Pemilik Pagar

Pihak KKP masih mendalami pelaku yang membangun pagar laut itu.

Pagar Tak Berizin

Lokasi pemagaran berada dalam Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi.

Pihak yang Mengaku

Kelompok nelayan Jaringan Rakyat Pantura (JRP) mengaku sebagai pihak yang membangun pagar tersebut.

kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023.

"Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia lima tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus perintah proses perintah pengadilan, tapi kalau sudah usia lima tahun harus perintah pengadilan," terangnya.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam penerbitan sertifikat tanah tersebut. Mulai dari juru ukur, Kepala Seksi Pengukuran dan Survei Kantor Pertanahan (Kantah) Tangerang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Tangerang, serta Kepala Kantah Tangerang.

"Manakala nanti terbukti berada di luar garis pantai, dan manakala terbukti tidak compliance, manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur, dan manakala tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang ada," pungkasnya. (wid,rls/ist/dya)

Diduga Judol Pakai Dana Desa, PPATK Laporkan Kades

JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan temuan soal dugaan penyelewengan dana desa yang diduga digunakan untuk judi online (judol) oleh kepala desa ke Kejaksaan Agung.

"Hasil analisis, kami sudah sampaikan ke penyidik yang berwenang (Kejaksaan Agung)," kata

Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, saat dihubungi, Senin (20/1/2025).

Ivan mengatakan pihaknya banyak menemukan dugaan penyelewengan dana desa termasuk yang digunakan untuk bermain judi online oleh Kepala Desa.

Dia membeberkan salah satu penyelewengan tersebut terjadi di salah satu kabupaten di Sumatra Utara. Ia mengatakan PPATK menemukan setidaknya enam kepala desa yang menggunakan dana tersebut untuk judi online.

"Disetorkan guna bermain judi online antara Rp50 juta hingga Rp260 juta," ucap Ivan.

Ivan mengatakan salah satu dari enam kepala desa tersebut, ada yang memiliki jabatan sebagai Ketua Asosiasi APDES Kabupaten.

Ivan juga mengatakan pihaknya menemukan sebanyak Rp40 miliar dana desa di kabupaten tersebut yang diduga dipakai untuk judol.

Di sisi lain, PPATK juga akan menelusuri penyelewengan dana desa yang diduga digunakan untuk judol di provinsi lainnya.

Belakangan pemerintah getol memberantas judi online usai sejumlah pegawai Komdigi terlibat



Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (tengah). Dok

judi haram tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan memblokir 8.500 rekening bank yang terindikasi judi online (judol) sepanjang 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan pihaknya meminta perbankan untuk melakukan pembekuan terhadap rekening yang sesuai dengan identitas pelaku terkait judol.

"Kami melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kepen-

dudukan, serta melakukan enhanced due diligence atau EDD," kata Dian, dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (7/1/2025).

Dian mengatakan OJK memerintahkan perbankan untuk terus memantau rekening-rekening dormant atau rekening yang sudah lama tidak digunakan nasabahnya.

"Rekening dormant ini sekarang menjadi perhatian yang cukup luar biasa oleh bank. Dan sekarang hampir seluruh bank saya kira sudah memiliki disiplin yang sangat ketat terkait dengan rekening dormant ini," ucap Dian. (din/rls, ant/dya)

PERKEMBANGAN DANA DESA



Sumber : kemenkeu RI

Kejagung Revisi Kerugian Negara Korupsi Gula Tom Lembong, Naik Jadi Rp 578 M



Ada sembilan tersangka baru dari pihak swasta dalam kasus dugaan rasuah impor gula yang menyeret Tom Lembong. (Ist)

JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap total kerugian negara yang disebabkan dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Mendag Thomas

Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai tersangka mencapai Rp 578 miliar. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan nilai kerugian tersebut didapat dari hasil perhitungan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Terkait kerugian negara ini sudah fiks, nyata, riil. Berapa jumlahnya? Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP adalah Rp 578.105.411.622,47," ujar Qohar dalam jumpa pers, Senin (20/1/2025).

Jumlah ini mengalami penambahan, sebelumnya kerugian negara disebut hanya Rp 400 miliar.

Qohar mengatakan, penambahan terjadi setelah pihaknya melakukan serangkaian penyidikan lebih mendalam.

"Seiring dengan perkembangan karena data terus di-update penyidik, dan penghitungan terus dilakukan oleh BPKP, setelah 9 perusahaan ini masuk semua, ternyata kerugiannya lebih dari Rp 400 miliar," sambungnya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka, termasuk Tom Lembong. Mereka diduga melakukan impor gula tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tom sebelumnya juga sudah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Namun, Gugatan Praperadilan Tom ditolak oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan karena status tersangka yang disematkan kepadanya oleh Kejagung

sudah sah dan sesuai aturan hukum.

Di sisi lain Abdul Qohar menyebut ada sembilan orang tersangka baru. Mereka merupakan pihak swasta yang berperan melakukan pengolahan gula kristal mentah menjadi gula kristal putih.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami peroleh selama penyidikan, maka tim Jampidsus memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan sembilan tersangka," kata Abdul.

Abdul menjelaskan sembilan tersangka itu yakni TWNG selaku Direktur Utama PT AP, WN selaku Presdir PT AF, AS selaku Direktur Utama PT SUC, dan IS selaku Direktur Utama PT MSI.

Kemudian TSEP selaku Direktur PT MP, HAT selaku Direktur PT BSI, ASB selaku Direktur Utama PT KTM, HFH selaku Direktur Utama PT BFM, dan ES selaku Direktur PT PDSU. (Ant, ist, din/dya)

Bidik 4 Potensi Pajak Baru, Pemkot Batu Targetkan PAD 2025 Rp 311 M



Dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan eksekutif dan legislatif tahun ini, kami mencatat ada empat potensi pajak baru yang perlu dioptimalkan. Salah satunya adalah pajak dari vila, mengingat Kota Batu sebagai destinasi wisata memiliki lebih dari 1.000 vila yang beroperasi,"

M. NUR ADHIM
Kepala Bapenda Kota Batu,

SURABAYA-Pemkot Surabaya tahun ini kembali memberikan kuota Beasiswa Pemuda Tangguh untuk jenjang kampus. Akan ada 600 mahasiswa berprestasi yang diberikan fasilitas UKT gratis dan uang saku Rp 500.000 per bulan.

Selain itu juga berhak atas uang penunjang kuliah Rp 750.000 per semester. Cara mendapatkan beasiswa ini sangat mudah. Asal mahasiswa berprestasi, semua berpeluang besar mendapatkan fasilitas tersebut.

"Tahun ini kami mencari 600 mahasiswa berprestasi. Januari ini 300 dan sekitar Juni nanti juga 300. UKT kami gratiskan asal lolos," kata Kepala Disbud-porapar Surabaya Hidayat Syah, Senin (20/1/2025).

Program Beasiswa Pemuda Tangguh ini dijalankan dengan bekerja sama dengan seluruh PTN di Surabaya dan Madura. Bahkan ada PTN di Malang hingga Yogyakarta juga bekerja sama dengan Pemkot. Total yang dibiayai Pemkot untuk beasiswa Pemuda Tangguh adalah 3.500.

"Tapi hanya PTN yang bekerja



PKL di Alun-alun Kota Batu, salah satu potensi PAD dari retribusi PKL terokalisasi. (Santi/Lenteratoday)

sama dengan Pemkot yang kami sediakan beasiswa Pemuda Tangguh. Kebanyakan kampus negeri di Surabaya," tandas Hidayat.

Kampus itu adalah UGM, ITB, ITS, Unair, Unesa, UINSA, Unibraw Malang, UPN Veteran Jatim, Univ Trunojoyo Madura, PPNs, PENS, Poltekes, dan Universitas Terbuka.

Dalam perjalanannya, Pemkot Surabaya bersama PTN akan melakukan evaluasi setiap semester. Evaluasi tersebut meliputi IPK (Indeks Prestasi Kumulatif), keaktifan kuliah, dan juga keterlibatan mahasiswa pada program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya. (Adv, Ama/Dya)

Ada 1,3 Ton Sampah **Belum Tertangani** di Kota Malang



Pengolahan sampah di TPA Supit Urang Kota Malang. (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan mengakui sebanyak 1,3 ton sampah di Kota Malang hingga kini masih belum tertangani dengan baik. Pemerintah kota (Pemkot) berupaya mencari solusi, termasuk melalui program pengelolaan terpadu yang melibatkan masyarakat.

"Masih ada 1,3 ton sampah yang belum terkelola. Ini yang harus diintervensi. Kenapa itu belum terkelola, apakah karena masyarakat masih banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya, atau seperti apa," ujar Iwan, Senin

(20/1/2025).

Iwan mengatakan, setiap harinya Kota Malang mampu menghasilkan sekitar 780 ton sampah. Dari jumlah tersebut, sekitar 560 ton sampah telah masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang.

Di mana sebagian kecil sampah, yakni sekitar 50 ton telah berhasil diolah menjadi produk melalui sorting dan komposting. Namun, mayoritas sampah menurutnya masih ditimbun menggunakan metode sanitary landfill.

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan

sebanyak 200 ton sampah lainnya juga telah dikelola di tingkat TPS 3R, bank sampah, dan pengepul sampah. Meski pengelolaan di tingkat masyarakat ini cukup membantu, Iwan menilai langkah yang lebih terintegrasi dan strategis masih sangat diperlukan.

"Kemarin kan kita sudah kedatangan Pak Menteri PU, beliau bahkan menyebut TPA Supit Urang ini layak dijadikan percontohan nasional. Tetapi, yang masih perlu kita lakukan terus menerus adalah edukasi ke masyarakat. Pengelolaan sampah bukan hanya PR pemerintah, tetapi kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan," paparnya.

Sebagai langkah jangka panjang, Iwan menyebut Pemkot Malang juga berencana memaksimalkan program Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) untuk mengatasi permasalahan sampah. Program yang sedang diupayakan untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat ini, bertujuan menangani pengelolaan sampah secara terpadu di skala kota, bukan lagi terbatas di level parsial.

"Melalui LSDP, Pemkot menargetkan pengurangan sampah yang masuk ke TPA dan mengolahnya menjadi produk bernilai ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi sampah yang

masuk ke TPA tidak hanya ditimbun. Tapi bisa dikelola lebih banyak," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menjelaskan upaya pengelolaan sampah dengan LSDP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan di TPA Supit Urang.

Jika program ini berjalan optimal, pada tahun 2026 nanti, sebanyak 250 ton sampah per hari dapat diolah di TPA, atau lebih dari 50 persen dari total sampah yang masuk.

Meski optimistis, Rahman juga mengingatkan umur sanitary landfill di TPA Supit Urang hanya tersisa 6 tahun lagi. Jika tidak ada langkah konkret, Kota Malang akan menghadapi krisis pembuangan sampah. "Kita tidak bisa hanya bergantung pada pengelolaan di TPA. Masyarakat harus mulai memilah sampah sejak dari rumah tangga," ujarnya.

Mengamini pernyataan Pj Iwan, Rahman juga menegaskan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Sosialisasi dan edukasi terus dilakukan oleh Pemkot Malang, namun menurutnya kesadaran masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program pengelolaan sampah. (Santi/Dya)

Trump Ingin Relokasi Warga Gaza ke Indonesia

WASHINGTON - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald J Trump berencana merelokasi sejumlah orang dari 2 juta warga Palestina di Gaza ke Indonesia untuk sementara waktu. Rencana itu disebut saat ini masih didiskusikan oleh sejumlah pihak.

Hal itu disampaikan oleh salah satu tim transisi Trump dalam wawancara dengan NBC News. Awalnya, pejabat tim transisi itu mengungkapkan utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff berencana untuk berkunjung ke jalur Gaza sebagai bagian dari upayanya menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel-Hamas.

Witkoff juga dilaporkan berencana selalu hadir di wilayah tersebut selama beberapa minggu dan bulan mendatang untuk memecahkan masalah yang terjadi di lapangan. Sebab, pihak Trump yakin ada sejumlah pihak berencana membatalkan perjanjian dan menghentikan pembebasan sandera.

"Anda harus berada tepat di atasnya, siap untuk memadamkan masalah jika hal itu terjadi," kata pejabat tersebut dilansir NBC News, Senin (20/1/2025).

NBC mengatakan selain mengelola fase kesepakatan saat ini dan menegosiasikan fase berikutnya, Trump dan timnya juga berupaya mencari solusi jangka panjang.

"Jika kita tidak membantu warga Gaza, jika kita tidak membuat kehidupan mereka lebih baik, jika kita tidak memberi mereka harapan, maka akan terjadi pemberontakan," kata pejabat transisi tersebut.

Salah satu hal yang disusun pihak Trump yakni merelokasi warga Gaza. Laporan NBC mengatakan pejabat tim transisi itu mengatakan pihaknya sedang berdiskusi untuk merelokasi 2 juta warga Palestina untuk sementara waktu ke sejumlah negara salah satunya Indonesia.

"Pertanyaan mengenai bagaimana membangun kembali Gaza masih menjadi pertanyaan, serta di mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi untuk sementara waktu. Indonesia, misalnya, merupakan salah satu negara yang sedang didiskusikan untuk mengetahui lokasi tujuan dari negara-negara tersebut," kata pejabat transisi tersebut dalam laporan NBC News.

NBC News dalam laporan menyebut belum mengetahui apakah warga Gaza bersedia untuk pindah atau tidak. NBC mengatakan gagasan relokasi sangat kontroversial di kalangan warga Palestina dan sesama warga Arab. Dalam laporan berita itu juga disebut relokasi akan menjadi langkah pertama Israel yang memaksa mereka meninggalkan tanah mereka.



Presiden terpilih Donald Trump tiba di bandara Dulles pinggir kota Virginia jelang pelantikannya. (ist)

Kabar mengenai rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia ini juga sudah sampai ke media Israel. Bahkan media lokal Israel, The Times of Israel menulis judul berita 'Tim Trump Mempertimbangkan Relokasi Beberapa Warga Gaza Selama Pembangunan Pasca-perang', dalam berita itu juga ditulis Indonesia adalah salah satu negara yang dipertimbangkan untuk menampung warga Gaza.

"Tim transisi Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merelokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza sementara

rekonstruksi jalur Gaza yang hancur pasca-perang berlangsung, dengan salah satu negara menjadi tuan rumah sementara yang dipertimbangkan untuk menerima pengungsi adalah Indonesia," tulis media The Times of Israel.

Respons Kemlu

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menerima usulan dari pihak manapun, termasuk dari Amerika Serikat, soal wacana relokasi besar-besaran pengungsi Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia.

Hal tersebut disampaikan untuk merespons wacana relokasi pengungsi Gaza yang diusulkan di tengah rencana kunjungan utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff ke Gaza, sebagaimana diwartakan media AS, NBC News, Sabtu (18/1/2025).

"Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini," ujar Jubir Kemlu Rolliansyah Soemirat, Senin (20/1/2025).

Banyak yang meyakini bahwa relokasi ke tempat lain justru memberi dalih bagi Israel untuk mengusir warga Gaza dari Tanah Airnya.

Terkait dukungan bagi pemulihan di Gaza menyusul tercapainya gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, Indonesia senantiasa aktif membantu bangsa Palestina dengan berbagai cara, namun tak termasuk dengan menerima relokasi pengungsi Palestina.

Menurut Menlu RI Sugiono pada Jumat (17/1/2025), selain siap mendukung rekonstruksi Gaza dan menambah pengiriman bantuan kemanusiaan, RI juga siap mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah Palestina tersebut jika diminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (NBC News, Antara, ist/nei)

Trump Kembali ke Gedung Putih, Era Baru Dimulai

WASHINGTON - Donald Trump akan dilantik sebagai presiden AS pada hari Senin (20/1/2025), mengawali masa jabatan empat tahun yang penuh gejolak dengan janji untuk mendorong batas-batas kekuasaan eksekutif, mendeportasi jutaan imigran, mengamankan pembalasan terhadap musuh-musuh politiknya dan mengubah peran AS di panggung dunia.

Pelantikan Trump melengkapi kebangkitan gemilang bagi seorang pengganggu politik yang selamat dari dua persidangan pemakzulan, satu hukuman pidana, dua percobaan pembunuhan, dan satu dakwaan karena berupaya membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2020.

Upacara tersebut akan berlangsung pada siang hari (1700 GMT) di dalam Rotunda Gedung DPR AS, empat tahun setelah segerombolan pendukung Trump melanggar simbol demokrasi Amerika dalam upaya yang gagal untuk mencegah kekalahan Trump dari Partai Republik pada tahun 2020 atas Joe Biden dari Partai Demokrat. Pelantikan dipindahkan ke dalam ruangan untuk pertama kalinya dalam 40 tahun karena cuaca yang sangat dingin.

Trump, presiden AS pertama sejak abad ke-19 yang memenangkan masa jabatan kedua setelah kehilangan Gedung Putih, mengatakan dia akan mengampuni "pada Hari Pertama" banyak dari lebih dari 1.500 orang yang didakwa terkait dengan serangan 6 Januari 2021.

Janji itu merupakan salah satu dari serangkaian tindakan eksekutif terkait imigrasi, energi, dan tarif yang akan ditandatangani Trump paling cepat hari Senin (20/1/2025) setelah diambil sumpah jabatannya. Dalam rapat umum bergaya kampanye pada hari Minggu (19/1/2025) di Washington, Trump berjanji akan memberlakukan pembatasan imigrasi yang ketat pada hari pertamanya.

Jeremi Suri, seorang sejarawan kepresidenan di University of Texas di Austin, membandingkan era sekarang dengan akhir abad ke-19, ketika Grover Cleveland menjadi satu-satunya presiden lain yang memenangkan masa jabatan tidak berturut-turut. Seperti sekarang, katanya, itu adalah masa pergolakan, karena kemajuan industri mengubah ekonomi, kesenjangan kekayaan meledak dan proporsi imigran

Amerika mencapai puncaknya dalam sejarah.

"Yang sebenarnya kita bicarakan adalah ekonomi yang berbeda secara fundamental, negara yang berbeda secara fundamental dalam hal ras, gender, dan susunan sosial, dan kita sebagai sebuah negara tengah berjuang untuk mencari tahu apa artinya itu," katanya. "Ini adalah momen eksistensial."

Trump akan menikmati mayoritas Republik di kedua majelis Kongres yang hampir seluruhnya telah dibersihkan dari para pembangkang internal partai. Para penasihatnya telah menguraikan rencana untuk mengganti birokrat nonpartisan dengan loyalis yang dipilih sendiri.

Bahkan sebelum memangku jabatan, Trump telah membangun pusat kekuatan saingan pada minggu-minggu setelah kemenangan pemilunya, bertemu dengan para pemimpin dunia dan menimbulkan kekhawatiran dengan merenungkan rencana merebut Terusan Panama, menguasai wilayah Greenland milik sekutu NATO, Denmark, dan mengenakan tarif pada mitra dagang terbesar AS. (Reuters, ist/nei)

Anak Obesitas Picu Risiko Demensia

ANAK yang gemuk sering membuat gemas orang yang melihatnya. Padahal, obesitas pada anak tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan fisik, tetapi juga dapat menurunkan kemampuan berpikir dan ingatannya atau dikenal dengan demensia di kemudian hari. Padahal, umumnya demensia terjadi pada lansia atau yang berusia 60 tahun ke atas.

Peneliti menemukan bahwa demensia bisa terjadi pada orang-orang yang lebih muda, terutama pada anak-anak yang masa kecilnya sudah mengalami obesitas dan tidak beraktivitas fisik dengan cukup.

Sebuah penelitian dari Oxford University, seperti dikutip dari Daily Mail, mengamati 862 anak dengan berat badan yang telah diukur sejak usia 7 tahun, serta aktivitas fisik mingguan sejak usia 11 tahun.

Kemudian, otak mereka dipindai oleh peneliti di usia sekitar 20 tahun untuk dianalisis terkait dengan demensia.

Hasilnya, orang-orang dengan BMI (Body Mass Index) lebih tinggi pada usia 7 tahun dan mengalami kenaikan berat badan yang signifikan hingga usia 17 tahun, ternyata memiliki perbedaan dalam struktur 'jaringan mode default' mereka, yang dikaitkan dengan demensia di usia yang lebih tua.

Anak-anak dengan BMI yang lebih tinggi dan kurang beraktivitas fisik juga cenderung memiliki perbedaan dalam korteks entorhinal mereka, yang menurut bukti juga berperan dalam demensia.

Hasilnya menunjukkan otak anak-anak dapat berkembang secara berbeda jika mereka tidak cukup berolahraga dan kelebihan berat badan.

Hal ini dapat menyebabkan si kecil lebih berisiko terkena demensia saat mereka dewasa. Meski begitu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui apakah hal ini benar bisa

terjadi.

"Demensia dipandang sebagai penyakit yang menyerang orang lanjut usia. Tetapi, temuan kami menunjukkan tubuh yang sehat juga diperlukan di masa kanak-kanak dan remaja," ujar penulis utama studi, Holly Haines, yang penelitiannya diterbitkan dalam jurnal eBioMedicine.

"Ada kesadaran yang berkembang bahwa gaya hidup kita sepanjang hidup, sejak usia muda, dapat memengaruhi apa yang terjadi pada kita di kemudian hari. Dan tidak ada kata yang terlalu dini untuk lebih sehat sejak usia muda," lanjut dia.

Tips Mengatasi Obesitas pada Anak

Mengatasi obesitas pada anak sebenarnya bisa dilakukan dengan cara mengubah pola makan dan gaya hidup menjadi lebih sehat.

Perubahan ini penting karena anak yang mengalami obesitas mempunyai kemungkinan lebih besar mempertahankan k a n kondisinya h i n g g a remaja dan dewasa.

Untuk mengatasi obesitas pada anak, coba lakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Orang Tua Jadi Contoh

Berikan contoh yang baik tentang kebiasaan makan sehat dan beraktivitas fisik secara teratur. Termasuk juga membiasakan jadwal makan yang teratur dan mengajak si kecil makan bersama keluarga di meja makan. Sehingga, anak akan merasa bahwa kebiasaan ini penting dilakukan bersama.

2. Beraktivitas Fisik

Dorong anak untuk beraktivitas fisik atau berolahraga setidaknya 60 menit dalam sehari. Cari tahu aktivitas apa yang ia sukai, seperti berenang, bermain bola, dan lainnya. Cara ini bisa mengurangi anak terlalu banyak berdiam diri, dan juga mengurangi waktu layarnya, lho!

3. Camilan Sehat

Anda juga bisa membuat berbagai pilihan camilan sehat untuk si kecil di rumah, seperti popcorn tanpa mentega, buah-buahan dengan yoghurt rendah lemak, atau sereal gandum dengan susu rendah lemak.

4. Pilihan Makanan

Buatlah menu makanan yang fokus pada makanan bergizi, seperti buah-buahan dan sayur, biji-bijian, protein tanpa lemak, hingga susu rendah lemak.

Kontrol porsi makan anak dengan menyesuaikan kebutuhan kalorinya. Namun, jangan berkecil hati jika anak tidak langsung menyukai menu makanan sehat yang telah Anda masak. Sebab, butuh beberapa kali diberikan sampai akhirnya nanti anak akan terbiasa pada makanan tersebut.

5. Hindari Hadiah Makanan yang Tidak Sehat

Beberapa orang tua kerap menyajikan camilan seperti permen, cokelat, atau es krim bila ia berhasil menghabiskan makanannya. Namun, hindari cara ini karena bukanlah ide yang bagus.

6. Tidur Cukup

Pastikan anak mendapat tidur yang cukup. Hal ini merujuk pada beberapa penelitian yang mengungkapkan tidur yang terlalu sedikit dapat meningkatkan risiko obesitas. Kurang tidur juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon, yang berujung pada peningkatan nafsu makan.

Penanganan Obesitas pada Anak

Penanganan obesitas tergantung usia dan ada tidaknya kondisi medis yang diderita oleh anak. Mengingat anak masih tumbuh dan berkembang, pengaturan diet pada anak obesitas adalah diet dengan gizi seimbang sesuai kebutuhannya. Target penurunan berat badan pada anak obesitas sangat minimal, yaitu hanya 0,5-2 kg per bulan atau cukup dipertahankan agar tidak bertambah karena proses pertumbuhan masih berlangsung.. (nei,ist/dya)



MEGAROKET STARSHIP, Sukses dan Gagal Uji Coba ke-7

MEGAROKET adalah roket raksasa yang dimiliki oleh perusahaan SpaceX. Megaroket milik SpaceX bernama Starship. Megaroket Starship dirancang untuk membantu manusia menjelajahi Mars. Roket ini membawa bahan bakar dan oksigennya sendiri

Uji peluncuran megaroket milik SpaceX, Starship, yang ketujuh kalinya telah dilakukan pada Kamis (16/1/2025), waktu Texas Selatan, Amerika Serikat atau Jumat (17/1/2025) pagi, waktu Indonesia barat. Uji itu sukses dan gagal.

Peluncuran yang ketujuh bertujuan antara lain menguji sekali lagi kemampuan menangkap roket pendorong Starship, yang dikenal sebagai Super Heavy, sekembalinya ke permukaan bumi. Super Heavy tak dijatuhkan di lautan, melainkan langsung kembali ke menara peluncurannya di Starbase, Texas Selatan.

Uji pada Kamis lalu
d i h a r a p
mengul

angi keberhasilan uji yang kelima pada Oktober lalu. Saat itu lengan pencapit di menara peluncuran berhasil menangkap dan mendudukkan kembali Super Heavy di atas landasannya.

Seperti dikutip dari laporan Space.com, misi itu sukses pada Kamis lalu. Super Heavy kembali ke dalam pelukan lengan pencapit dengan mulus sekitar tujuh menit setelah peluncuran. Dengan langsung kembali ke landasan, SpaceX bisa mempersempit rentang waktu antar-peluncuran.

Tapi, tak semua berjalan mulus pada Kamis lalu. SpaceX hilang kontak dengan Ship, roket di bagian atas Starship, sekitar 1,5 menit setelah Super Heavy berhasil ditangkap di landasan atau 8,5 menit sejak peluncuran. Seluruh enam mesin Raptor milik Ship terbakar, mesin langsung drop, disusul hilang kontak.

"Kami kehilangan semua komunikasi dengan roket—hal itu pada dasarnya memberi tahu kami bahwa ada anomali pada bagian atas," kata Manajer Komunikasi SpaceX, Dan Huot, yang beberapa menit kemudian

mengonfirmasi bahwa roket tersebut hilang.

Seharusnya, jika tak terjadi ledakan, Ship masih akan meluncur cukup jauh sebelum jatuh kembali ke bumi di Samudera Hindia di pantai barat Australia, sekitar 66 menit setelah peluncuran. Itu seperti yang dilakukan dalam tiga uji peluncuran sebelumnya.

Uji ketujuh ini juga sebenarnya disiapkan untuk menampilkan kemampuan baru dari Ship. Sekitar 17,5 menit setelah lepas kanas dari bumi, roket bagian atas itu sejatinya akan melepaskan 10 dumi satelit. Satelit-satelit tiruan itu dibuat dengan ukuran dan bobot yang sama dengan generasi Starlink berikutnya.

Uji coba itu akan sangat penting karena SpaceX

memproyeksikan mengandalkan Starship untuk menyelesaikan pembangunan megakonstelasi Starlink. Saat ini kontelasinya telah terdiri dari hampir 7 ribu satelit di orbit rendah bumi dan akan dibuat menjadi lebih dari 40 ribu.

Rencananya pula, para dumi satelit itu akan mengikuti trayek suborbital Ship, dan terjun ke Samudera Hindia. Sebagai catatan, Ship yang kali ini diluncurkan lebih panjang 6,5 kaki karena adanya beberapa pembaruan dan modifikasi.

Sebanyak enam kali uji peluncuran Starship sebelumnya dilakukan dalam rentang April-November 2023 dan Maret, Juni, Oktober, dan November tahun lalu. SpaceX menguji penangkapan kembali Super Heavy pada uji keenam tapi terjadi masalah komunikasi dengan menara peluncuran.

Dampaknya uji lengan capit menangkap Super Heavy dibatalkan, dan roket dialihkan jatuh di perairan Teluk Meksiko. (nei,ist/dya)



Wahana ruang angkasa Starship lepas landas untuk uji coba ke-enam dari Starbase di Boca Chica, Texas, 19 November 2024. (Foto: Chandan Khanna/AFP)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: GATOT SUNARKO I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I TRENGGALEK: TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Desainer dan Brand Lokal Hadirkan Busana Imlek 2025

TAHUN Baru Imlek segera tiba, perayaan Imlek sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang majemuk terutama sejak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengumumkan Tahun Baru China sebagai hari besar nasional.

Biasanya momen ini dirayakan dengan suka cita. Beragam tempat hiburan mengubah dekorasi menjadi serba merah. Tak cuma itu, industri fashion juga kerap jadi bagian penting dalam perayaan ini. Hal ini bisa ditandai dengan banyaknya desainer hingga brand lokal yang meluncurkan koleksi khusus untuk Tahun Ular Kayu ini. Deretan busana yang dihadirkan didominasi oleh warna merah dan atasan hingga terusan berkerah cheongsam.

Untuk perayaan Tahun Baru Imlek 2025 kali ini, ada Sejauh Mata Memandang hingga Wilsen Willim yang turut meramaikan momen spesial dengan merilis koleksi terbaru. Nah, buat kamu yang merayakan Imlek, berikut ada beberapa rekomendasi busana dari desainer dan label Tanah Air yang tak boleh kamu lewatkan.

Sejauh Mata Memandang

Setelah 10 tahun, untuk pertama kalinya Sejauh Mata Memandang (SMM) meluncurkan koleksi khusus Tahun Baru Imlek.

Koleksi yang terdiri dari 29 look ini bertajuk Aruna yang dalam bahasa Sanskerta berarti sinar yang kemerah-merahan atau fajar. Pemilihan nama ini begitu menggambarkan Tahun Baru Imlek yang selalu didominasi oleh warna merah.

Tiap busananya terinspirasi dari budaya peranakan dan melayu, seperti kebaya encim, cheongsam, dan busana berkerah mao. Aruna dibuat menggunakan berbagai material, seperti kain tenun sutra, tenun denim yang terbuat dari benang daur ulang,

tenun Sengkang, hingga teknik menarik seperti bordir hingga patchwork. Beberapa busana dari koleksi Aruna ini cocok untuk kamu yang ingin memberikan twist pada tampilan Imlek. Ada perpaduan warna seperti ungu dan merah hingga merah dan kuning yang tak terduga.

Kamu bisa mendapatkan kebaya, kemeja, kain, celana, stagen, hingga scarf ini di situs resmi SMM dengan harga mulai dari Rp 450.000.

Wilsen Willim

Koleksi bernuansa peranakan ini menampilkan potongan kebaya, qipao, beskap, korset, hingga gaun dan rok bervolume. Ladies bisa menemukan detail klasik seperti kerah Shanghai, kancing frog-knot, dan tassels yang kerap jadi sentuhan wajib dalam busana-busana untuk Imlek. Untuk koleksi yang dijual terbatas ini, Wilsen Willim memilih warna merah hati sebagai fokus utama.

Koleksi Lunar New Year 2025 ini dibuat dari material katun, linen, jacquard, serta renda. Semua dikreasikan untuk menghasilkan busana-busana klasik dengan sentuhan kontemporer khas Wilsen Willim.

Kamu bisa mendapatkan koleksi spesial ini di Galeries Lafayette Pacific Place Jakarta dan Central Department Store Grand Indonesia. Harganya mulai dari Rp 1.500.000.

ANW x Pillar

Ingin bergaya lebih modern saat Imlek nanti? Pilihan busana dari koleksi Year of the Snake oleh brand lokal ANW x Pillar bisa jadi pilihan. Label yang didirikan pada 2018 oleh desainer Astrid Nadia Wiradinata dan Ilaine Prasetyo ini menghadirkan atasan transparan yang khas dengan kerah Shanghai. Ada juga atasan dan dress kerutan berdetail kancing frog-knot yang sudah

dimodifikasi.

Palet warnanya dipilih khusus sesuai dengan kepercayaan tradisi Tiongkok. Ada warna hijau giok yang melambangkan kemurnian dan kemakmuran, merah marun yang menggambarkan semangat dan keberuntungan, dan biru giok yang mengawinkan festivity dan keanggunan. Ladies bisa mendapatkan koleksi ini dengan harga mulai dari Rp 2.200.000 di situs dan gerai resmi Pillar, serta situs resmi ANW.

Toko Didiyo

Brand lokal yang satu ini turut menyemarakkan perayaan Imlek 2025. Bertajuk House of Jade, Toko Didiyo merilis busana seperti satu set rok dan kemeja cropped berdetail kancing frog-knot, gaun dengan rok bervolume, sampai atasan tanpa lengan berdetail renda.

House of Jade dari Toko Didiyo ini cocok buat kamu yang bosan berbusana merah ketika Imlek. Sebab sesuai namanya, koleksi ini didominasi oleh warna hijau layaknya giok.

S a p t o Djojokartiko

Desainer S a p t o

Djojokartiko meluncurkan koleksi baru khusus untuk Imlek. Pada 2025 ini, Sapto membagi koleksinya menjadi dua, yaitu Ferbena dan Tangerine.

Untuk kamu yang suka warna lembut, koleksi Ferbena bisa jadi pilihan. Busana-busananya hadir dalam warna seperti hijau muda, ungu, dan merah maroon yang diyakini melambangkan keberuntungan dan kecanggihan.

Lalu untuk koleksi Tangerine, warnanya lebih berani seperti oranye. Ada detail menarik seperti bros rumbai yang bisa mengelevisi tampilan. (nei,ist/dya)



Mendadak Konsesi... (dari Hal 1)

RAPAT perubahan ketiga UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) digelar tertutup di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (20/1/2025).

Baleg DPR menggelar rapat maraton untuk membahas RUU tersebut, meski mereka masih berada di masa reses yang tinggal sehari lagi. Rapat dihadiri 23 anggota Panja RUU Minerba yang mewakili delapan fraksi partai di DPR.

Dalam rapat pleno, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan, rapat ini menindaklanjuti hasil rapat pimpinan Baleg bersama Kapoksi Baleg pada 14 Januari 2025. "Terkait hal tersebut, pimpinan Baleg telah menugaskan tim ahli untuk merumuskan RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara," kata Bob.

Dia menjelaskan makna utama dari perubahan UU Minerba ini menyoroti empat hal. Pertama, terkait percepatan hilirisasi mineral dan batu bara. Dia mengatakan, hilirisasi harus didorong agar Indonesia bisa lebih cepat mewujudkan swasembada energi.

Kedua, terkait aturan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Ketiga, terkait pemberian IUP kepada perguruan tinggi. Keempat, terkait pemberian IUP untuk usaha kecil menengah (UKM) dan usaha kecil.

Bob mengatakan, revisi UU Minerba kali ini juga berpijak pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Beleid tersebut menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara. Negara memiliki dan mengendalikan semua aset alam ini, untuk digunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat.

"Bahwa kesejahteraan rakyat tidak hanya di dalam areal pertambangan itu, masyarakat hanya terkena debu batu bara atau akibat-akibat dari pada eksploitasi mineral dan batu bara, tapi hari ini merupakan peluang bagi masyarakat di RI sehingga dapat melakukan satu usaha yang secara langsung," kata Bob.

Sementara, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengungkap bahwa selama sepekan terakhir memasuki masa sidang, sejumlah anggota mulai rutin menggelar rapat. Termasuk jadwal rapat di Baleg DPR.

"Teman-teman seminggu ke belakang ini sebelum masa sidang sudah banyak yang masuk kantor dan kemudian melakukan pengumpulan bahan-bahan untuk melakukan

revisi," kata Dasco, Senin (20/1).

Namun, Dasco tak mengungkap alasan mendesak DPR menggebut pembahasan RUU Minerba. Padahal, RUU tersebut tak masuk daftar Prolegnas Prioritas.

Terpisah, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa perguruan tinggi yang akan mengelola lahan tambang harus memiliki badan usaha, sebagaimana yang berlaku pada ormas keagamaan.

"Ya, tentu (punya badan usaha), makanya sekarang sedang kami bahas," ujar Doli.

Doli menyampaikan bahwa pola antara pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada perguruan tinggi dan ormas keagamaan akan memiliki pola yang hampir sama.

Ke depannya, kata dia, dibahas mengenai siapa yang akan dikedepankan antara pemberian prioritas pengelolaan lahan tambang kepada ormas keagamaan atau perguruan tinggi.

"Nanti misalnya pemberian prioritas siapa yang dikedepankan, apakah institusi ormas atau perguruan tingginya langsung, atau harus dengan berbadan hukum, itu yang sekarang kami bahas," ucap Doli.

Karena penyusunan revisi Undang-Undang Minerba tersebut baru di tahap usulan inisiatif DPR, Doli menyampaikan bahwa pihak pemerintah dan perguruan tinggi belum dilibatkan dalam rapat.

"Besok kami undang, mana pihak yang bisa memberikan masukan, saran dan pertimbangan," kata Doli.

Baleg DPR RI berniat untuk menambahkan pasal dalam UU Minerba, yakni Pasal 51A ayat (1) yang menyatakan WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.

Kemudian, Pasal 51A ayat (2) mengatur soal pertimbangan pemberian WIUP ke perguruan tinggi, salah satunya persyaratan akreditasi perguruan tinggi yang boleh mengelola lahan tambang, yakni paling rendah terakreditasi B.

Lalu, Pasal 51A ayat (3) menyampaikan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP kepada perguruan tinggi yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah (PP).

Anggota Baleg DPR Bambang Haryadi mengatakan langkah ini ditujukan agar dapat mengurangi biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan dana kuliah yang harus dibayarkan mahasiswa per semester.

"Perguruan tinggi negeri untuk mengurangi biaya UKT lah. Jadi biar mereka, ormas kan udah dikasih ormas keagamaan, nah perguruan

tinggi UGM, Undip gitu-gitulah untuk biar mereka bisa mengelola dengan baik," kata Bambang.

Meski demikian, Bambang menekankan bahwa agenda ini masih dalam tahap usulan dan belum masuk ke tahap pembahasan mendalam. Adapun, proses rapat untuk pembahasan usulan inisiatif ini dijadwalkan berlangsung pada hari ini dan bersifat tertutup.

"Ormas kan juga dulu skemanya belum ada sih, Makanya diperbaiki skema pemberian itu kan pemberian langsung itu kan di undang-undangnya nggak ada, makanya diperbaiki sekalian," ujar Bambang.

Bisa Timbulkan Masalah Baru

Hal berbeda dikatakan Anggota Badan Legislasi DPR RI Umu Kabunang Rudi Yanto Hunga. Dia menilai bahwa pemberian izin tambang ke perguruan tinggi dapat menimbulkan permasalahan baru.

"Bagaimana pemerintah bisa memilih memberikan suatu kewenangan kepada universitas, perguruan tinggi, yang mana harus diberikan kepada ribuan universitas di Indonesia? Ini menimbulkan masalah baru," ucap Umu dalam rapat pleno penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), di Senayan, Jakarta, Senin.

Menurut Umu, kurang tepat apabila universitas diberikan kewenangan untuk mengolah tambang apabila tujuan pemerintah adalah mendukung pemberian pendidikan yang bermutu di tingkat perguruan tinggi.

Ia berpendapat, lebih tepat apabila kebijakan yang diberikan adalah bantuan dana langsung kepada universitas.

"Sepanjang kita belum mengatur bagaimana undang-undang universitas atau perguruan tinggi itu disesuaikan dengan pengelolaan tambang," ucapnya.

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengungkapkan bahwa meskipun dalam Tridharma terdapat nilai pengabdian kepada masyarakat, hal tersebut tidak dilakukan untuk komersial.

"Dari tiga Tridharma, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tadi tidak mengarah pada hal yang komersial, jadi saya kira tidak tepat. Meskipun akan bikin PT dan lain sebagainya, saya rasa tidak tepat," ungkap Fahmy Senin (20/1/2025).

Dia menambahkan, dibandingkan revisi untuk keempat kalinya bagi UU Minerba, pemerintah harusnya fokus pada RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang masih jalan

di tempat.

"Saya kira UU EBT ini yang lebih mendesak, karena ini akan menjadi dasar hukum bagi pengembangan EBT di dalam negeri. Investor tadi juga akan berpikir ulang sebelum itu (RUU EBET) disahkan," ungkapnya.

Senada, analisis hukum Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bayu Yusya mengatakan pemberian lahan tambang kepada perguruan tinggi untuk tujuan mendapatkan profit sangat tidak tepat.

"Sedangkan perguruan tinggi berfungsi untuk mencetak generasi intelektual untuk pengabdian ke masyarakat. Jika perguruan tinggi terjun ke bisnis pertambangan, maka ia sebenarnya sudah tidak berpedoman pada Tridharma Perguruan Tinggi, melainkan untuk kepentingan bisnis semata," katanya.

Bayu menambahkan, Perguruan tinggi menurutnya lebih cocok mengelola tambang untuk tujuan akademik dan riset, bukan komersial.

"Jika pengelolaannya tidak dibatasi untuk tujuan komersial, ada risiko perguruan tinggi terlibat dalam praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip pendidikan. Selain itu revisi ini berpotensi menjadi kebijakan yang berbahaya dan kontraproduktif, karena membuka pintu bagi eksploitasi pertambangan secara besar-besaran," jelasnya. (din,rls,ist,ant,bis/dya)

Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia pada tahun 2024 adalah 4.634.

- 4.302 IUP untuk mineral logam dan batu bara
- 31 Kontrak Karya
- 59 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
- 10 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
- 48 Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
- 184 Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)



DPRD Surabaya Gaungkan Beasiswa Pemuda Tangguh

Laila Mufidah: Sosialisasi Harus Masif ke RT/RW hingga Jamaah Yasin

SURABAYA-Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mengajak seluruh warga Surabaya memanfaatkan program beasiswa Pemuda Tangguh secara maksimal. Beasiswa yang diprioritaskan untuk pelajar dan mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin) ini harus efektif dan tepat sasaran.

Khusus untuk jenjang kampus atau bagi mahasiswa, beasiswa tersebut sudah dibuka. Program yang diadakan setiap tahun oleh Pemkot Surabaya ini bisa diakses pendaftarannya sejak 16 Januari lalu dan akan berakhir pada 5 Februari 2025. Pendaftaran melalui online dengan membuka website: <https://besmart.surabaya.go.id/>.

"Program untuk mencerdaskan anak bangsa ini harus berjalan efektif. Semua warga yang berhak harus mendapat manfaat secara maksimal," ungkap Laila Mufidah, Senin (20/1/2025).

Laila mendukung penuh program intervensi Pemkot Surabaya dalam bidang pendidikan itu. Tidak hanya membantu meraih masa depan anak dari keluarga kurang mampu, tapi juga bisa mengubah taraf hidup keluarga. "Sehingga bisa menaikkan kesejahteraan keluarga," tegasnya.

Setelah lulus pendidikan tinggi, diharapkan para pemuda/pemudi ini bisa mendapat pekerjaan yang layak. Selanjutnya bisa mendongkrak ekonomi keluarga. "Ayo seluruh mahasiswa dan calon mahasiswa, manfaatkan beasiswa ini," tandas Laila.

Politisi perempuan PKB ini terus mendorong agar program tersebut berjalan makin optimal. Seluruh kuota harus bisa dimanfaatkan atau idak ada kuota kosong. Salah satu evaluasi tahun sebelumnya adalah masih belum optimalnya program ini. Dari total kuota sebanyak 3.500 per tahun untuk jenjang kuliah dan pelajar, ternyata belum sepenuhnya terserap.

"Harus makin masif sosialisasinya ke masyarakat. Benar memang era gadget akan memudahkan Informasi apa pun. Agar tepat sasaran dan masif, keberadaan RT dan RW harus dimanfaatkan sebagai kepanjangan tangan Pemkot di tingkat kampung," kata Ketua Perempuan Bangsa Surabaya ini.

Ketua RT dan RW harus menyampaikan program Beasiswa Pemuda Tangguh di setiap pertemuan warga. Bahkan seluruh jamaah Yasin di setiap kampung juga harus mendapat sosialisasi beasiswa ini. "Eman jika



(Ilustrasi) Pendaftaran Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya kategori mahasiswa 2025 dibuka mulai 16 Januari - 05 Februari 2025. (Dok. Humas Surabaya)

tidak dimanfaatkan dengan maksimal," jelasnya.

Akses Pendidikan Tinggi

Laila mengingatkan, setiap warga Surabaya berkesempatan mendapatkan beasiswa tersebut, terutama warga dari keluarga Gakin. Sehingga, keluarga kurang mampu pun bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi.

"Asal berprestasi dan pintar, semua akan ada jalan. Mahasiswa dan calon mahasiswa dari keluarga kurang beruntung, fokus utamakan prestasi. Seluruh biaya dan kebutuhan kuliah akan dicukupi Pemkot lewat beasiswa itu," kata pimpinan DPRD ini.

Tahun 2025 ini, Pemkot Surabaya akan membiayai total 3.500 penerima beasiswa Pemuda Tangguh semua jenjang. Khusus jenjang kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa asli KTP Surabaya.

Beasiswa Pemuda Tangguh kuliah ini selain dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang digratiskan, juga menerima uang saku bulanan dan uang penunjang kuliah. Besarannya Rp 500.000 per bulan dan Rp 750.000 per semester.

Setiap tahun, rata-rata DPRD Surabaya bersama Pemkot Surabaya menganggarkan lebih dari Rp 60 M. Anggaran ini khusus membiayai ribuan pelajar dan mahasiswa berprestasi asli Surabaya dari keluarga

kurang mampu agar meraih masa depan.

Syarat utama adalah berprestasi, yakni prestasi akademik dengan IPK minimal 3.00. Atau prestasi nonakademik dengan perolehan juara tingkat kota, provinsi, maupun nasional di bidang seni, olahraga, sains, dan prestasi lainnya.

Laila menyampaikan persyaratan cukup mudah. Yang paling pokok adalah mahasiswa asli atau ber-KTP Surabaya. Kemudian masih aktif jadi mahasiswa PTN (yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya) dan bukan penerima beasiswa instansi lain.

Dokumen yang ditunjukkan adalah IPK minimal 3.00, surat keterangan sehat, tidak menikah, mahasiswa semester 1 lampirkan rapor, melampirkan bukti prestasi baik akademik maupun nonakademik. (Adv, Ama/Dya)



Program untuk mencerdaskan anak bangsa ini harus berjalan efektif. Semua warga yang berhak harus mendapat manfaat secara maksimal.

LAILA MUFIDAH

Wakil Ketua
DPRD Surabaya

Dicari 600 Mahasiswa: UKT Gratis, Uang Saku Rp 500 Ribu/Bulan

PEMKOT Surabaya tahun ini kembali memberikan kuota Beasiswa Pemuda Tangguh untuk jenjang kampus. Akan ada 600 mahasiswa berprestasi yang diberikan fasilitas UKT gratis dan uang saku Rp 500.000 per bulan..

Selain itu juga berhak atas uang penunjang kuliah Rp 750.000 per semester. Cara mendapatkan beasiswa ini sangat mudah. Asal mahasiswa berprestasi, semua berpeluang besar mendapatkan fasilitas tersebut.

"Tahun ini kami mencari 600 mahasiswa berprestasi. Januari ini 300 dan sekitar Juni nanti juga 300. UKT kami gratiskan asal lolos," kata Kepala Disbudporapar Surabaya Hidayat Syah, Senin (20/1/2025).

Program Beasiswa Pemuda Tangguh ini dijalankan dengan bekerja

sama dengan seluruh PTN di Surabaya dan Madura. Bahkan ada PTN di Malang hingga Yogyakarta juga bekerja sama dengan Pemkot. Total yang dibiayai Pemkot untuk beasiswa Pemuda Tangguh adalah 3.500.

"Tapi hanya PTN yang bekerja sama dengan Pemkot yang kami sediakan beasiswa Pemuda Tangguh. Kebanyakan kampus negeri di Surabaya," tandas Hidayat.

Kampus itu adalah UGM, ITB, ITS, Unair, Unesa, UINSA, Unibraw Malang, UPN Veteran Jatim, Univ Trunojoyo Madura, PPNS, PENS, Poltekes, dan Universitas Terbuka.

Dalam perjalanannya, Pemkot Surabaya bersama PTN akan melakukan evaluasi setiap semester.

Evaluasi tersebut meliputi IPK (Indeks Prestasi Kumulatif), keaktifan kuliah, dan juga keterlibatan mahasiswa pada program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya. (Adv, Ama/Dya)